



LKJ TW I TAHUN 2025

Laporan Kinerja Triwulan I

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Pekalongan

Pemerintah Kota Pekalongan
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jl. Sriwijaya No.40 Telp. (0285) 422868
Email. dinsosp2kb@gmail.com

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



YOS ROSYIDL S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

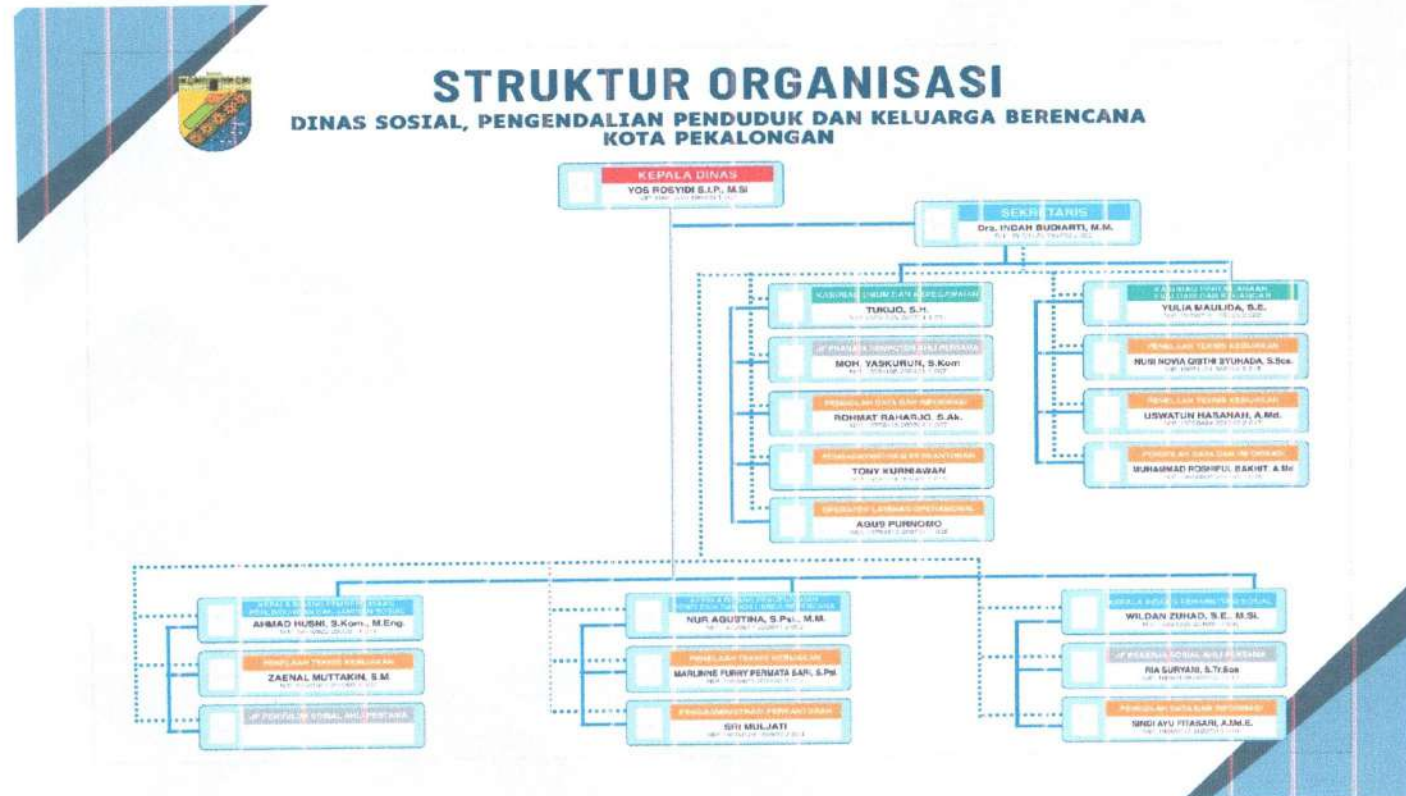
1. perumusan dan penetapan sasaran, programurusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
3. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
7. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
8. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dst.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Tujuan Strategis :				
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	89,88	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bag. Organisasi
2	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	3,00	Formulasi : Jumlah DTKS tahun N - Jumlah DTKS tahun N-1 / Jumlah DTKS tahun N-1 * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB
3	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	2,156	Formulasi : Total Fertility Rate tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BKKBN
Sasaran Strategis :				
1	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP OPD	74,90	Formulasi : Nilai SAKIP tahun N

	kinerja perangkat daerah			Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5,00	Formulasi : Jumlah PPKS yang akan diturunkan adalah Jumlah PPKS tahun terakhir dikalikan target penurunan Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB
3	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,60	Formulasi : Jumlah peserta KB aktif dibagi Pasangan Usia Subur x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Tujuan Strategis Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	89,88	0 persen	0 persen	-
2	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	3,00	0 persen	0 persen	-
3	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	2,156	0 persen	0 persen	-
Rata-rata Capaian						0

Tabel 2.4

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	74,90	0 persen	0 persen	100 %
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5,00	0 persen	0 persen	100 %
3	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,60	0 persen	0 persen	100 %
Rata-rata Capaian						100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebesar 100 % dengan kategori sangat rendah

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya hasil Penilaian IKM dan SAKIP pada triwulan I sehingga realisasi belum bisa diketahui dan akan baru diketahui pada bulan Desember;
2. Belum adanya Perhitungan TFR dan MCPR dari BKKBN ;
3. Perhitungan penurunan PPKS yang masih baru akan diketahui pada akhir tahun.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Memperbarui informasi kelengkapan untuk penilaian SAKIP dan IKM
2. Optimalisasi sumber daya yang ada;
3. Memperbarui data KESOS P2KB agar valid sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Program	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan I (Rp)	Realisasi s.d Triwulan I (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	3.755.039.000	1.482.240.967	857.708.205	57,86
2	Program Pemberdayaan Sosial	390.512.000	173.715.000	69.243.222	39,86
3	Program Rehabilitasi Sosial	1.760.492.000	445.427.500	249.558.338	56,02
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.492.520.000	583.717.000	343.192.269	58,79
5	Program Penanganan Bencana	345.520.000	141.475.000	124.230.031	87,81
6	Program Pengelolaan	102.910.000,-	14.165.400	12.993.298	91,72

No	Program	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan I (Rp)	Realisasi s.d Triwulan I (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
	Taman Makam Pahlawan				
7	Program Pengendalian Penduduk	205.380.000	10.160.000	58.021.632	571,07
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.746.610.000	120.784.000	163.299.829	135,19
9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.617.120.000	38.135.000	14.042.328	36,82
Rata-rata Capaian					126,12

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan I adalah sebesar 126,12%

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 126.11%. Hal ini belum bisa dilihat dari sisi efisiensi karena pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya dilaksanakan

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi harmonisasi dengan stakeholder terkait;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur; dengan mengikutsertakan diklat / bimbingan teknis terkait tupoksi dan strategi pencapaian SPM;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan penggunaan anggaran sehingga menjadi lebih efisien;
4. Optimalisasi pendataan dan *update* data kesos serta data keluarga sehingga valid yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui
Wali Kota Pekalongan,

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekalongan,



H. ACHMAD ATZAN ARSLAN DJUNAID, SE., M.M



YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si
NIP. 19660516 198603 1 007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS



DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Dinas Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sekretaris Dinas mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Sekretaris Dinas melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025

SEKRETARIS DINAS



Dra Indah Budiarti, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19701129 199703 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Capaian Anggaran	10
BAB III PENUTUP	12
A Kesimpulan	12
B Rekomendasi	12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Sosial P2KB	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas	5
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	2
--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan sasaran, program, dan kegiatan dinas;
 2. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
 3. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
 4. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
 5. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan, dan kearsipan;
 6. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan bidang keuangan;
 7. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
 8. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 9. pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial per semester;
 10. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP);
 11. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
 12. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.
-

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sekretaris Dinas sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Dinas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
2	Tercapainya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
3	Tercapainya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretaris Dinas Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Sekretaris Dinas Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas Triwulan I Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1	Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja atau Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	25 persen	25 persen	100
2	Tercapainya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	25 persen	25 persen	100
3	Tercapainya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	25 persen	25 persen	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretaris Dinas adalah sebesar 100,06 % dengan kategori sangat berhasil. Hal ini antara lain disebabkan antara lain karena beberapa faktor yaitu :

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan dukungan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan

- Pengujian/Verifikasi, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dapat dilaksanakan sesuai target dan tepat waktu.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan dukungan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dapat dilaksanakan sesuai target dan tepat waktu. Hal ini disebabkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas direncanakan secara matang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya.
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan sesuai target dan tepat waktu. Hal ini disebabkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas direncanakan secara matang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya.
 4. Kerjasama tim pelaksana kegiatan di Sekretariat baik dari Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan maupun Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bekerjasama secara sinergis dan harmonis, saling mendukung untuk kelancaran, percepatan pelaksanaan kegiatan.
 5. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia baik dari sisi SDM maupun dari sisi alokasi anggaran/keuangan di Sekretariat Dinsos P2KB.
 6. Selalu berpedoman pada jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dan selalu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara optimal.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sekretariat sebagai pendukung pelayanan bagi seluruh aparatur SKPD berperan besar dalam keberhasilan pencapaian kinerja SKPD. Dengan pelayanan yang baik, bidang-bidang sebagai pelaksana pelayanan langsung ke masyarakat juga akan berjalan dengan baik dan optimal sehingga kinerja organisasi akan meningkat.

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja atau Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan indikator Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja pada triwulan I tercapai 25 persen hal ini didukung oleh
 - Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar 100 % yang terdiri dari kegiatan Penyusunan Dokumen RKA 2025 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Penyusunan RKA dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.
 - Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan Target kinerja berupa jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN serta jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD serta penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dimana gaji dan pengujian verifikasi Keuangan SKPD sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan
- b. Persentase ketercapaian ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah capaian kinerja pada triwulan I tercapai 25 persen hal didukung oleh ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah. ketercapaian administrasi umum perangkat daerah dengan kegiatan ini antara lain berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan, serta penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Kegiatan

disupport juga oleh ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan ini adalah laporan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

- c. Persentase ketercapaian pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah dengan indikator persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah capaian kinerja pada triwulan I tercapai 25 persen, didukung oleh kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

Rencana Tindak lanjut

Dari hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja triwulan I Tahun 2025, maka harus dirumuskan rencana tindak lanjut agar pencapaian sasaran kinerja bisa maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun rencana tindak lanjut sekretariat adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan
2. Mengusulkan reisi alokasi anggaran apabila dalam pelaksanaan di triwulan I masih terdapat kebutuhan-kebutuhan mendesak dan harus segera dilaksanakan
3. Mengusulkan revisi jadwal pelaksanaan kegiatan apabila terdapat kegiatan yang diperlukan perubahan jadwal kegiatan.
4. Mengusulkan perubahan anggaran dan anggaran kas dampak dari kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas, darurat sampah di pekalongan serta kegiatan lain yang perlu penyesuaian.

B. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan I Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target Triwulan I (Rp)	Realisasi Triwulan I (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.640.000	2.829.000	1.000.000	35,34
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.610.150.000	1.112.230.967	656.395.691	59,02
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.258.000	129.691.000	45.953.100	35,43
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365.321.000	100.929.000	77.469.341	76,76
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.670.000	136.561.000	76.890.073	56,30
Rata-rata Capaian					48,57

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan I adalah sebesar 48,57 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 48,57 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan I sebesar 25 %, terdapat selisih realisasi antara kinerja dengan anggaran sebesar 23,57 % hal ini belum bisa disimpulkan sebagai efisiensi anggaran karena target kegiatan belum selesai secara keseluruhan dilaksanakan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan telah dapat dilaksanakan secara optimal sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan, namun demikian pelaksanaan kegiatan agak terhambat karena munculnya kebijakan efisiensi anggaran terhadap perjalanan dinas dan kondisi darurat sampah di kota Pekalongan.
2. Pencapaian sasaran yang diperjanjikan telah diupayakan seoptimal mungkin sehingga tercapai target triwulan I seperti yang telah ditetapkan dan telah terjadwalkan
3. Strategi yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan target yang telah ditetapkan antara lain melalui :
 - a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta jajarannya
 - b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan kepada Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan beserta jajarannya
 - c. Mencermati kembali jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan karena akan berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja kegiatan.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja maupun keuangan Dinsos P2KB minimal setiap triwulan.
4. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja triulan I sebesar 25 %,

sedangkan realisasi anggaran sebesar 48,57 %, namun demikian hal ini belum bisa disimpulkan sebagai efisiensi mengingat capaian anggaran dan capaian kinerja masih berlangsung terus dan berkesinambungan sampai dengan akhir tahun.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris Dinas Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih mengoptimalkan segala sumber daya yang ada agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lebih optimal, kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sedangkan kegiatan yang belum saatnya dilaksanakan namun secara jadwal terpasang pada triwulan I perlu diusulkan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan untuk kedepannya.
2. Mempertahankan kinerja tim di Sekretariat untuk optimalisasi kinerja di triwulan serta tahun-tahun berikutnya agar bisa menghasilkan kinerja yang lebih optimal dan efisien serta efektif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pekalongan, 8 April 2025

Mengetahui
KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,



Yos Rosyidi, S. I. P., M. Si
NIP. 19660516 198603 1 007

SEKRETARIS DINAS

Dra. Indah Budiarti, MM
NIP. 19701129 199703 2 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL



DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

Kepala Bidang Pemberdayaan,
Perlindungan dan Jaminan Sosial

AHMAD HUSNI S.Kom., M.Eng

Pembina

NIP. 19740923 200501 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

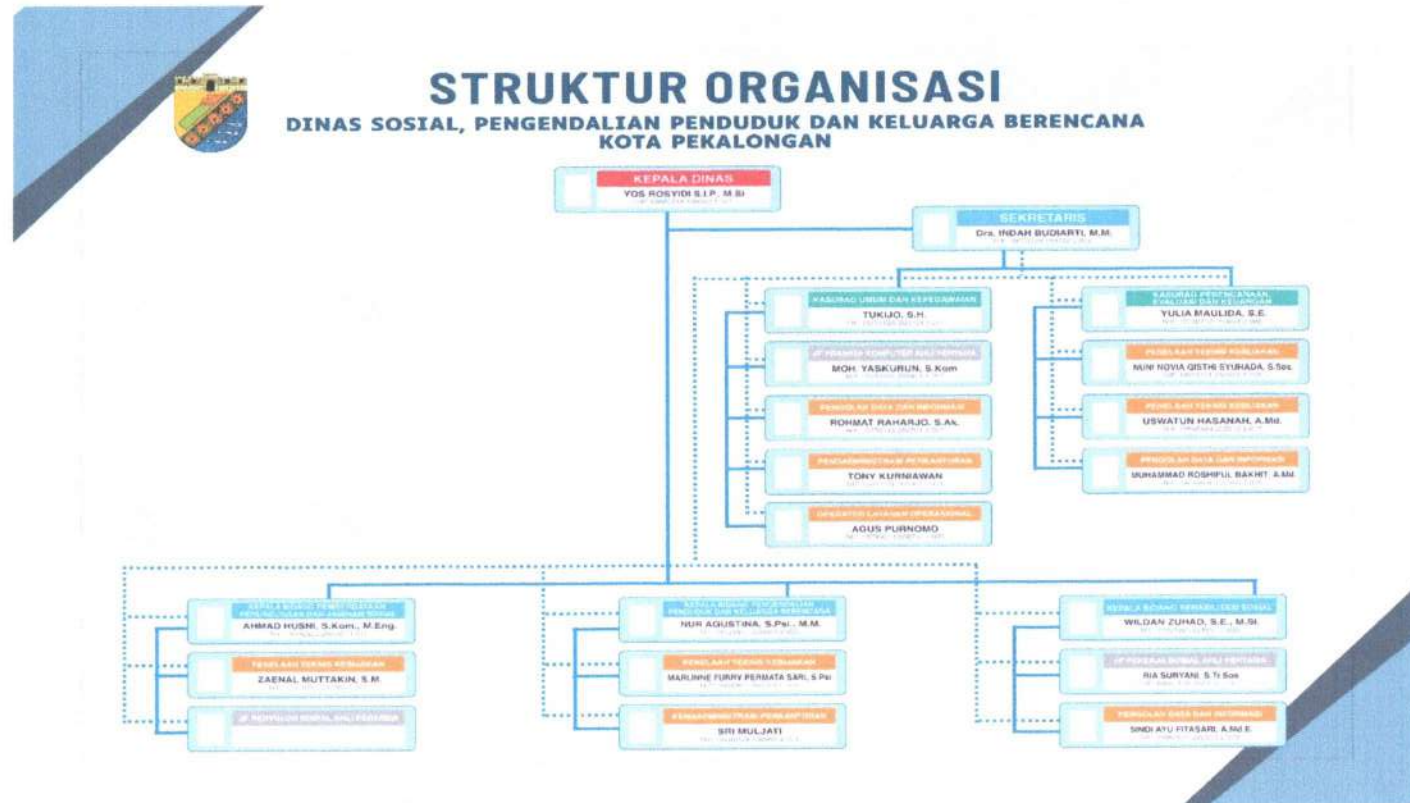
1. perumusan program kerja bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
2. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
4. pengoordinasian pengumpulan sumbangan dalam daerah;
5. pengoordinasian pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
6. pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah;
7. pengoordinasian pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
8. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dst.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Terlaksananya Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	<p>Formulasi : $(\text{Jumlah PSKS yang diberikan fasilitas} / \text{jumlah PSKS secara keseluruhan}) \times 100\%$</p> <p>Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik</p> <p>Sumber data : DinsosP2KB</p>
2	Terlaksananya Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen	<p>Formulasi : $(\text{Jumlah KPM Bansos (BPNT, PKH, PBI dll) tahun } n / \text{jumlah DTKS atau nama lain tahun } n) \times 100\%$</p> <p>Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik</p> <p>Sumber data : DinsosP2KB</p>
3	Terlaksananya Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 persen	<p>Formulasi : $\text{Jumlah TMP yang dipelihara/direhab} / \text{target jumlah TMP yang akan dipelihara/direhab} \times 100\%$</p> <p>Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik</p> <p>Sumber data : DinsosP2KB</p>

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	% Capaian
1	Terlaksananya Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	0 persen	0 persen	-
2	Terlaksananya Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen	53.73 persen	78.79 persen	146,64 persen
3	Terlaksananya Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Rata-rata Capaian						123,32

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebesar 123,32 % dengan kategori sangat berhasil.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama TIM antara bidang dayalinjamsos
2. Ketepatan dalam bekerja

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan I (Rp)	Realisasi s.d Triwulan I (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp. 182.140.000	Rp. 45.510.000	Rp. 44.193.376	97,10 %
2	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 208.372.000	Rp. 128.205.000	Rp. 25.049.846	19,53 %
3	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.492.520.000	Rp. 583.171.000	Rp. 343.192.269	58,84 %
4	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 102.910.000	Rp. 14.165.400	Rp. 12.993.298	91,72 %
Rata-rata Capaian					66,79 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan I adalah sebesar 66,79 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 66,79 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan I sebesar 123,32%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 84,63 %.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 123,32% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 66,79 %.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan jaminan Sosial Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

“ Perlu adanya percepatan pelaporan penggunaan anggaran “

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si

NIP. 19660516 198603 1 007

Kepala Bidang Pemberdayaan,
Perlindungan dan Jaminan Sosial,

AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng

NIP. 19740923 200501 1001

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL



DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

Kepala Bidang Pemberdayaan,
Perlindungan dan Jaminan Sosial



WILDAN ZUHAD, S.E., M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19851026 201001 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial.

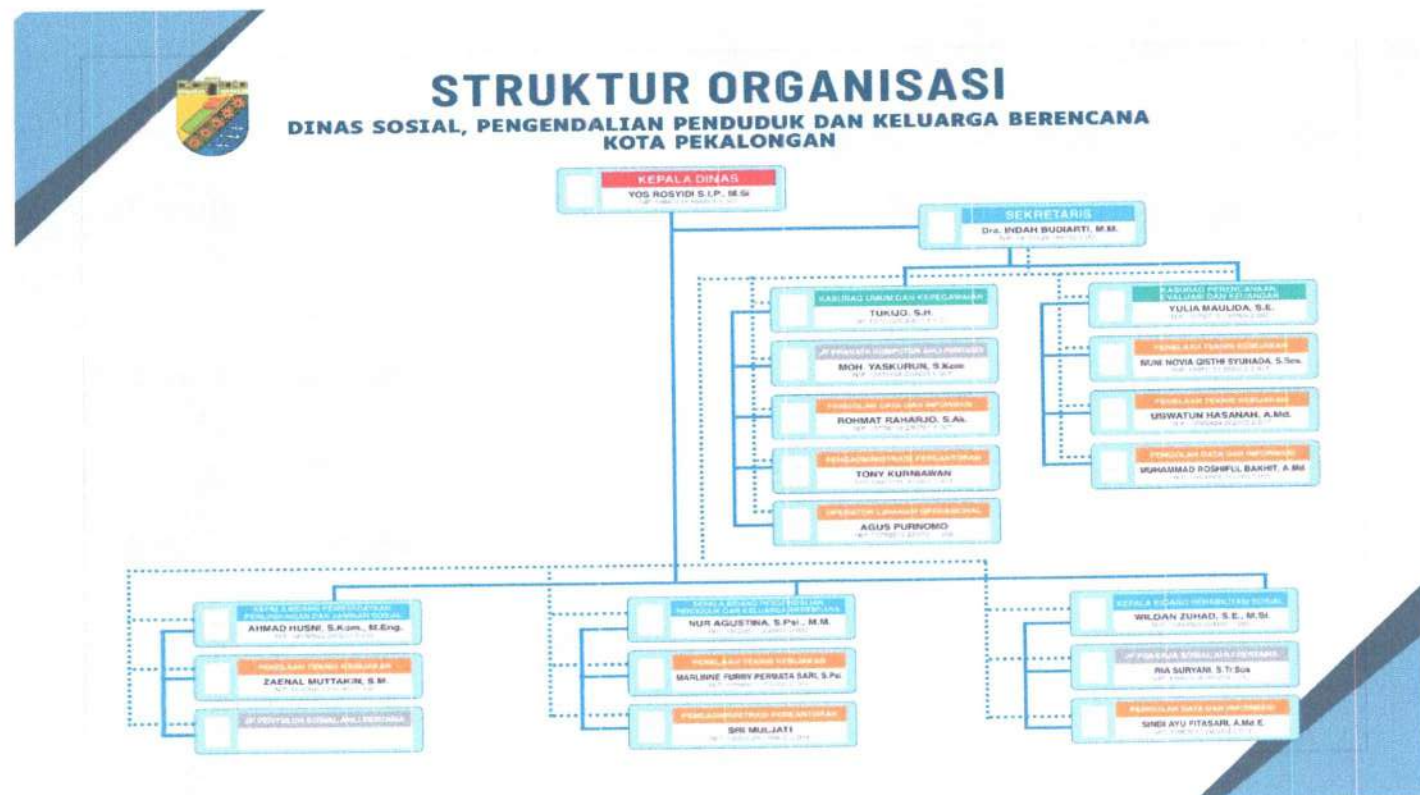
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan program kerja bidang rehabilitasi sosial;
2. perumusan bahan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
4. pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan i titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
5. penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
6. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
7. penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
8. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
9. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
10. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial
Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Tercapainya penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persentase disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	Formulasi : (Jumlah PSKS disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang diberikan pelayanan sosial/ jumlah seluruh disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DinsosP2KB
2	Tercapainya korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	Formulasi : (Jumlah Korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial/ seluruh korban bencana) x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DinsosP2KB

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial
Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	% Capaian
1	Tercapainya penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persentase disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2	Tercapainya korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama TIM antara bidang rehabsos
2. Ketepatan dalam bekerja

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan I (Rp)	Realisasi s.d Triwulan I (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 1.189.082.000	Rp. 294.044.500	Rp. 239.096.106	81,31 %
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 571.410.000	Rp. 151.383.000	Rp. 10.462.232	6,91 %
3	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 345.250.000	Rp. 141.475.000	Rp. 124.230.031	87,81 %
Rata-rata Capaian					58,67 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan I adalah sebesar 58,67 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 58,67%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan I sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 70,44%.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 58,67%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 70,44 %.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penetapan capaian

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si
NIP. 19660516 198603 1 007

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



WILDAN ZUHAD, S.E., M.Si

NIP. 19851026 201001 1 005

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 April 2025

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

NUR AGUSTINA, S.Psi.MM.

Pembina

NIP. 19720817 200604 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	6
A Tugas Jabatan	6
B Struktur Jabatan	7
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	8
A Perjanjian Kinerja.....	8
B Capaian Kinerja	10
C Capaian Anggaran	14
BAB III PENUTUP.....	17
A Kesimpulan	17
B Rekomendasi.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025.....	8
Tabel 2.2	Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	11
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025.....	12
Tabel 2.3	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	7
------------	---------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

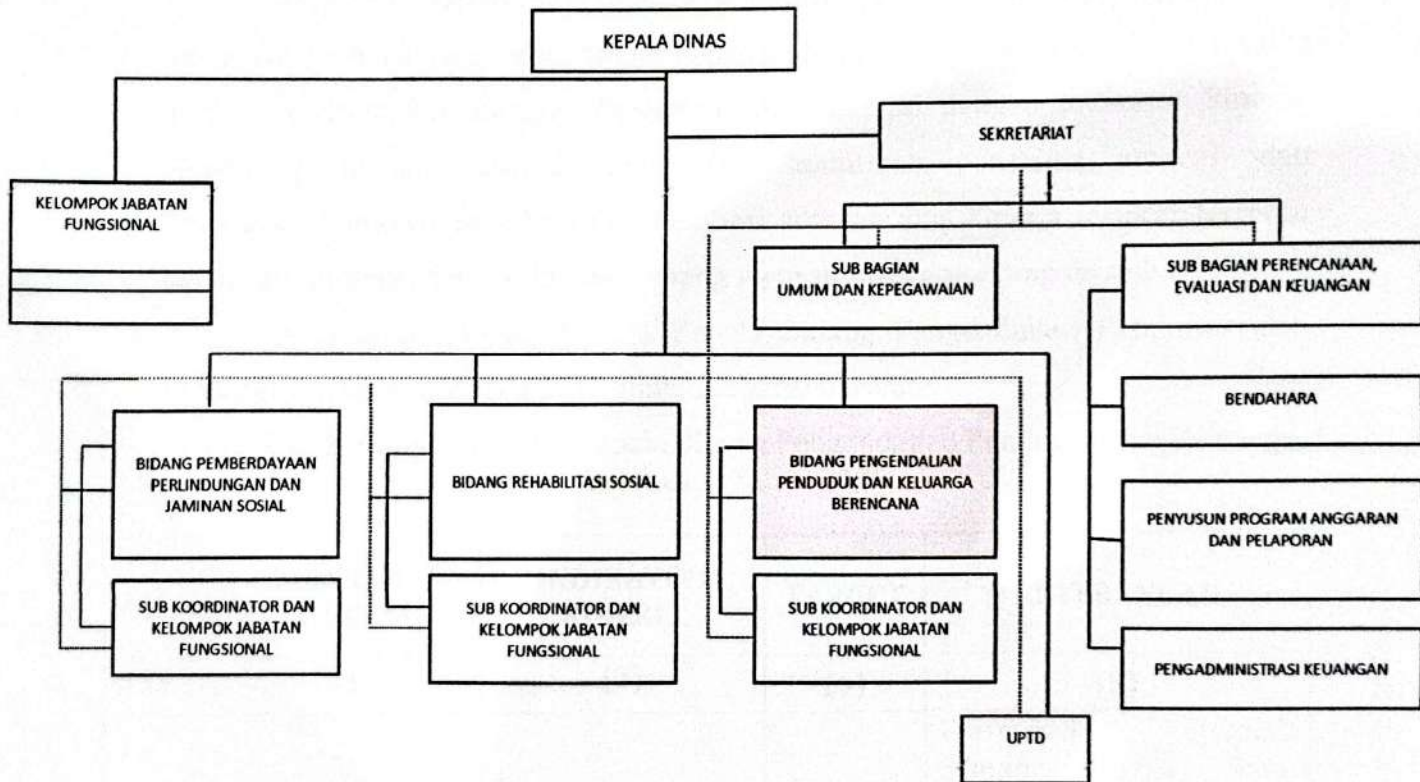
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan program kerja bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
2. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
4. pengoordinasian pengumpulan sumbangan dalam daerah;
5. pengoordinasian pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
6. pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah;
7. pengoordinasian pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
8. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

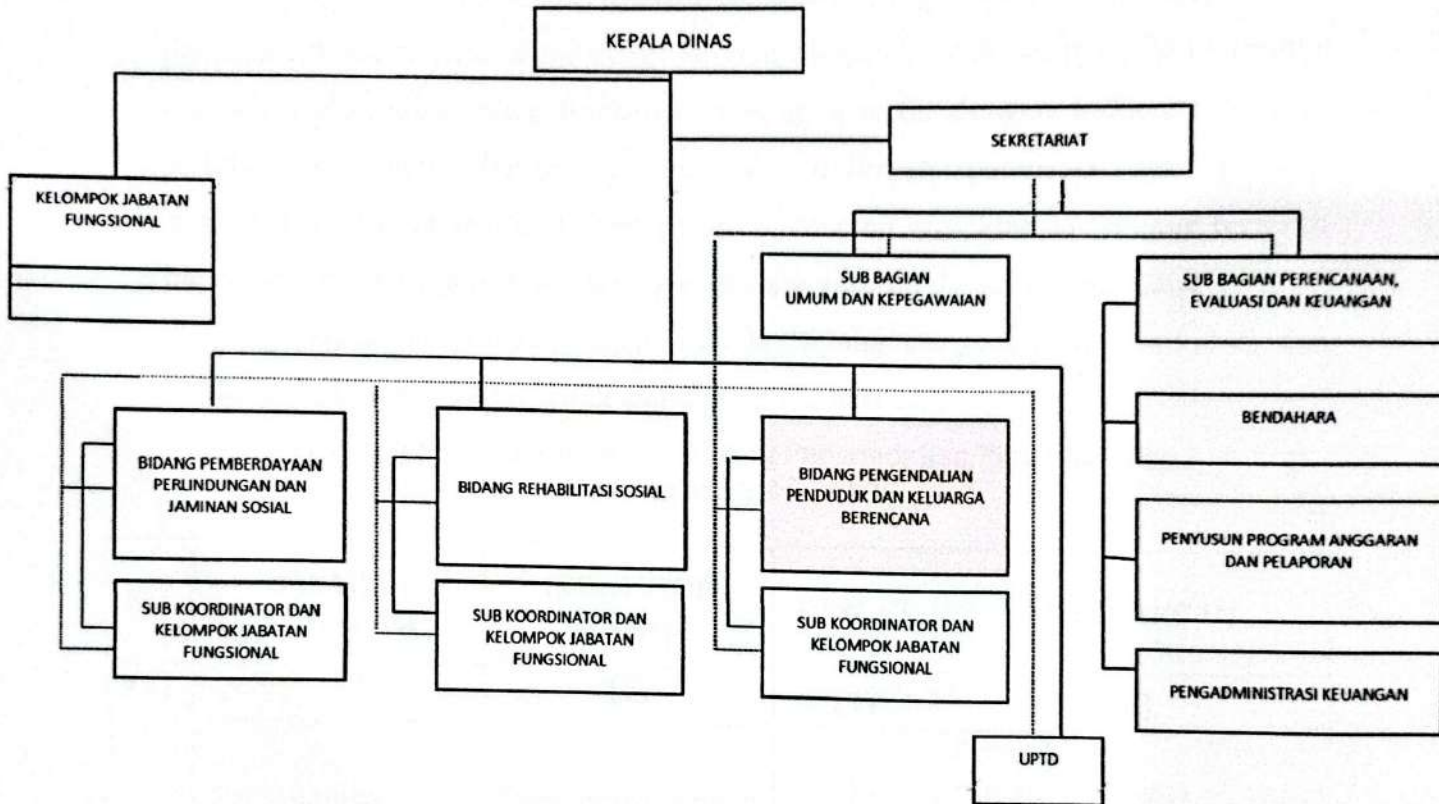
Gambar 1.1 Struktur Organisasi



B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}
1	Tercapainya rumah tangga yang dilakukan pendataan/ updating data keluarga	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/ updating data keluarga	100 persen	Formulasi : (Jumlah rumah tangga yang dilakukan pendataan / jumlah seluruh rumah tangga sekota*100%) Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB Kota Pekalongan
2	Tercapainya Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21Tahun	Persentase Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	12 persen	Formulasi : (Jumlah usia nikah yang kurang dari 21 tahun / jumlah nikah keseluruhan) x 100%) Tipe capaian : Semakin Rendah Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB Kota Pekalongan
3		Unmeet need KB	13 persen	Formulasi : (Jumlah PUS yang Tidak ingin Anak

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tercapainya Unmeet need KB			Lagi + jumlah PUS yang Ingin Anak tapi ditunda) / total PUS) x 100% Tipe capaian : Semakin Rendah Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB Kota Pekalongan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 205.380.000	APDB-P / DAK Non Fisik
2. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 899.576.000	APDB-P / DAK Non Fisik
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 847.034.000	APDB-P / DAK Non Fisik
4. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Rp.1.617.120.000	APDB-P / DAK Non Fisik

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1	Tercapainya rumah tangga yang dilakukan pendataan/ updating data keluarga	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/ updating data keluarga	100 persen	-	-	-
2	Tercapainya Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persentase Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	12 persen	-	-	-
3	Tercapainya Unmeet need KB	Unmeet need KB	13 persen	-	-	-
Rata-rata Capaian						-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak ditentukan pada Triwulan 1 sehingga tidak ada target dan realisasi.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak/ stakeholder terkait.
2. Adanya dukungan/ komitmen pimpinan dalam pelaksanaan program Bangsa Kencana

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa capaian indikator kinerja pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025
2. Bahwa target sasaran program dihitung sebagai target tahunan yang angka perhitungannya diperoleh pada akhir tahun 2025 / awal tahun 2026.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program terkait bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diupayakan sesuai target pada Triwulan IV Tahun 2025.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Anggaran Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target Triwulan I (Rp)	Realisasi Triwulan I (Rp)	% Capaian $((5)/(4)*100)$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 205.380.000	Rp. 10.160.000	Rp. 58.021.632	571,08
2	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 899.576.000	Rp. 10.605.000	Rp. 70.900.232	668,6
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 847.034.000	Rp. 110.179.000	Rp. 92.299.597	83,8
4	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 1.617.120.000	Rp. 38.135.000	Rp. 14.042.382	36,8
Rata-rata Capaian					340,07

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan I adalah sebesar 340,07 %

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi capaian kinerja Triwulan 1 tidak ada. Realisasi dan target capaian kinerja ditetapkan pada Triwulan IV. Namun realisasi anggaran Triwulan 1 sebesar 340,07 % dari target anggaran Triwulan 1.

B. Rekomendasi


Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Triwulan Tahun 2025 menggunkan sasaran program dan indikator kinerja berdasarkan sasaran program yang ditentukan pada Trimester IV.
2. Anggaran DAK/BOKB salur 1 (satu) diperkirakan bulan April 2025 , sehingga pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja mengikuti ketersediaan anggaran. Namun karena ada silpa/ sisa anggaran tahun 2024 maka pada awal tahun 2025 kegiatan yang bersumber DAK bisa dilaksanakan.
3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM menyebabkan pelaksanaan dan penyelesaian sub kegiatan perlu ditingkatkan agar indikator kinerja bisa tercapai secara optimal.

Pekalongan, 8 April 2025

Mengetahui,
KEPALA DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si
NIP. 19660516-1986031 007

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,


NUR AGUSTINA, S.Psi.MM
NIP. 19720817 200604 2 003

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN



DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

Kasubag Perencanaan Evaluasi dan
Keuangan

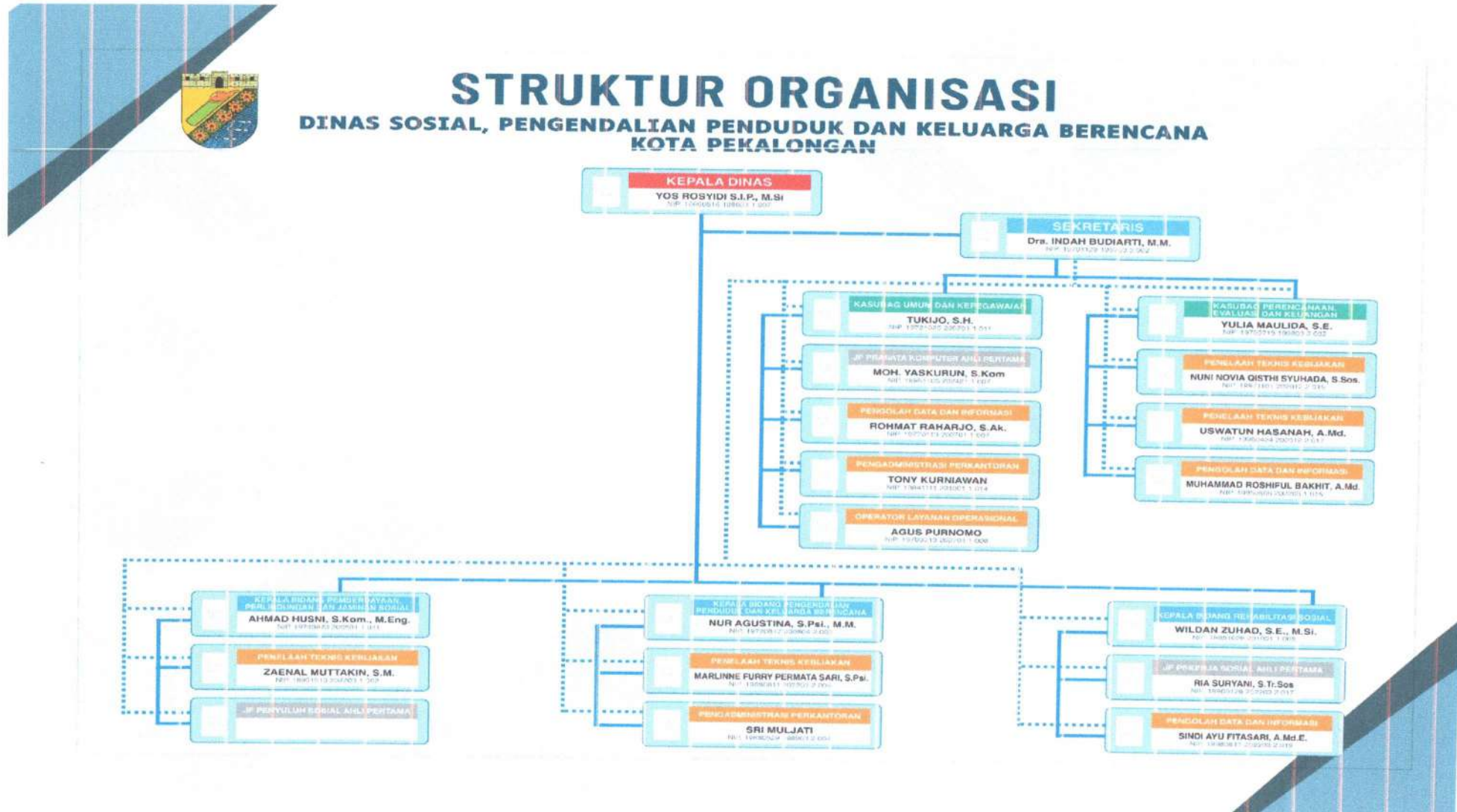


YULIA MAULIDA

PENATA

NIP. 197907191998032002

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kasubbag renval dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
2. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
3. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
4. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
5. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
6. melaksanakan fungsi akuntansi;
7. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
8. menyusun bahan profil perangkat daerah;
9. mengelola data dan informasi;
10. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. menyusun laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial;
12. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
13. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kasubag Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1.	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Formulasi : Persentase capaian sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah + persentase capaian sub kegi koordinasi penyusunan Dokumen RKA -SKP + Persentase capaian su keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi 3 Tipe capaian : semakin tinggi semakin baik Sumber data : DinsosP2KB
2.	Tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg penyediaan gaji dan tunjangan ASN + Persentase capaian sub keg Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD + Persentase capaian sub keg Koordinasi dan penyusunan Lap Keuangan akhir tahun SKPD dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DinsosP2KB

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
Triwulan I Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	% Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	26,67	26,67	100
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	75	75	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Persentase ketercapaian adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh pelaksana
2. Perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran
3. Pemanfaatan teknologi informasi
4. Kolaborasi antar stakeholder

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antar stakeholder
2. Kurangnya SDM yang kompeten dan handal
3. Penyajian data yang tidak akurat

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan berbasis data
2. Peningkatan kapasitas SDM
3. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan I (Rp)	Realisasi s.d Triwulan I (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.640.000,-	2.829.000,-	1.000.000,-	35,35
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.610.150.000,-	1.112.230.967,-	956.395.691,-	85,99
Rata-rata Capaian					60,67

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan I adalah sebesar 60,67 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 60,67%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan I sebesar 100%, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 60,67 %, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan berbasis data
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang

Mengetahui
SEKRETARIS


Dra. INDAH BUDIARTI, M.M
NIP. 19701129 199703 2 002

Pekalongan, 08 April 2025

Kasubag Perencanaan Evaluasi dan
Keuangan ,


YULIA MAULIDA, SE
NIP. 19790719 199803 2 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Pekalongan**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kasubbag Umum dan kepegawaian melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



TUKIJO S.H.

Penata

NIP. 19701025 200701 1 011

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kasubbag umum dan kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
2. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
3. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
4. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
5. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
6. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
7. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan kasubbag umum dan kepegawaian, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja perubahan merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
4	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	0	0	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100
4	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasubbag umum dan kepegawaian adalah sebesar 75% dengan kategori sangat tinggi

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan
2. Ketepatan koordinasi dan komunikasi yang sesuai

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target Triwulan I (Rp)	Realisasi Triwulan I (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	-	-	-
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.050.000	129.691.000	45.953.100	35,43%

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target Triwulan I (Rp)	Realisasi Triwulan I (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365.321.000	100.929.000	77.469.341	76,75%
4	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.670.000	136.561.000	76.890.073	56,30%
Rata-rata Capaian					56.16%.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan I adalah sebesar 56,16 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan I sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 78.06%.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan realisasi anggaran sebesar 56,16 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan kasubbag umum dan kepegawaian Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pencermatan kembali dalam penyusunan anggaran, target dan realisasi.
2. Pelaksanaan Kegiatan agar segera dilaksanakan lebih awal .
3. Untuk menunjang kinerja kedinasan agar fasilitasi pemeliharaan sarpras.

Pekalongan, 8 April 2025

Mengetahui
Sekretaris Dinas,



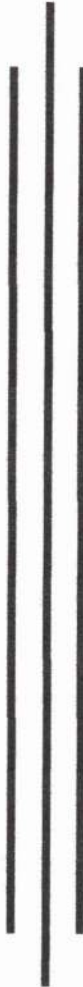
Dra. INDAH BUDIARTI M.M.
NIP. 19701129 199703 2 002

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



TUKIJO S.H.
NIP. 19701025 200701 1 011

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN TAHUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



ZAENAL MUTTAKIN, S.M

Penata Muda / III A

NIP. 19901013 202203 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
C Capaian Indikator Kinerja	3
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

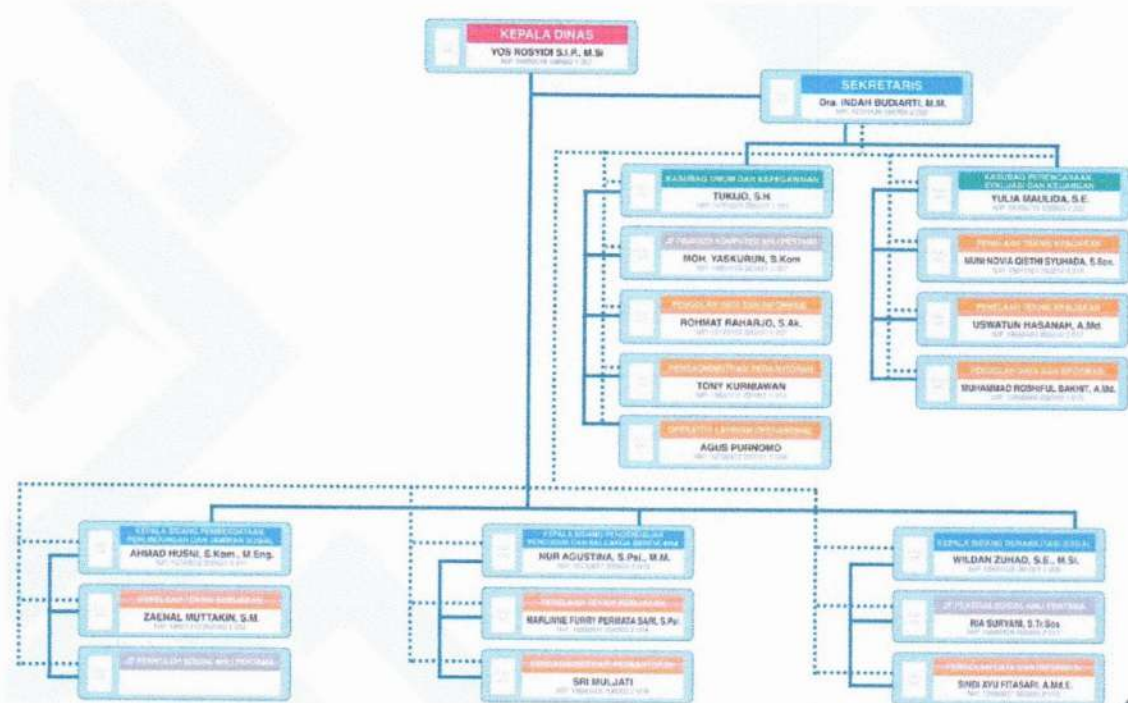
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas pokok jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Melakukan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah keluarga pada KAT yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas	600 Keluarga
2	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab./Kota	Jumlah PSKS yang mendapat peningkatan kapasitas	30 Orang
3	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab./Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya	4 Orang
4	Tercapainya Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya	2 Lembaga
5	Tercapainya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab./ Kota	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan verifikasi dan validasi	10.000 Keluarga
6	Tercapainya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PPKS yang memperoleh fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1.300 Orang
7	Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang terpenuhi pemeliharaannya	1 TMP

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja "Penelaah Teknis Kebijakan" Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1.	Tercapainya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah keluarga pada KAT yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas	600 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	100%

2.	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab./Kota	Jumlah PSKS yang mendapat peningkatan kapasitas	30 Orang	0 Orang	0 Orang	100%
3.	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab./Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100%
4.	Tercapainya Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya	2 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	100%
5.	Tercapainya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab./ Kota	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan verifikasi dan validasi	10.000 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	100%
6.	Tercapainya Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PPKS yang memperoleh fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1.300 Orang	500 Orang	500 Orang	100%
7.	Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang terpenuhi pemeliharaannya	1 TMP	1 TMP	1 TMP	100%
Rata-rata						100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 100 % dengan kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil”

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 100% dengan kategori “sangat tinggi/sangat berhasil”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam “Penelaah Teknis Kebijakan” Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 08 April 2025

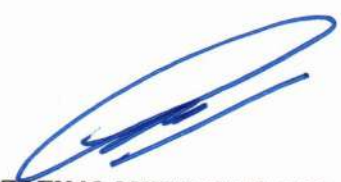
Mengetahui,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng.
NIP. 19740923 200501 1 011



ZAENAL MUTTAKIN, S.M
NIP. 19901013 202203 1 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengolah Data dan Informasi Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengolah Data dan Informasi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengolah Data dan Informasi melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



SINDI AYU FITASARI, A.Md.E

Pengatur / II C

NIP. 19980617 202203 2 019

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

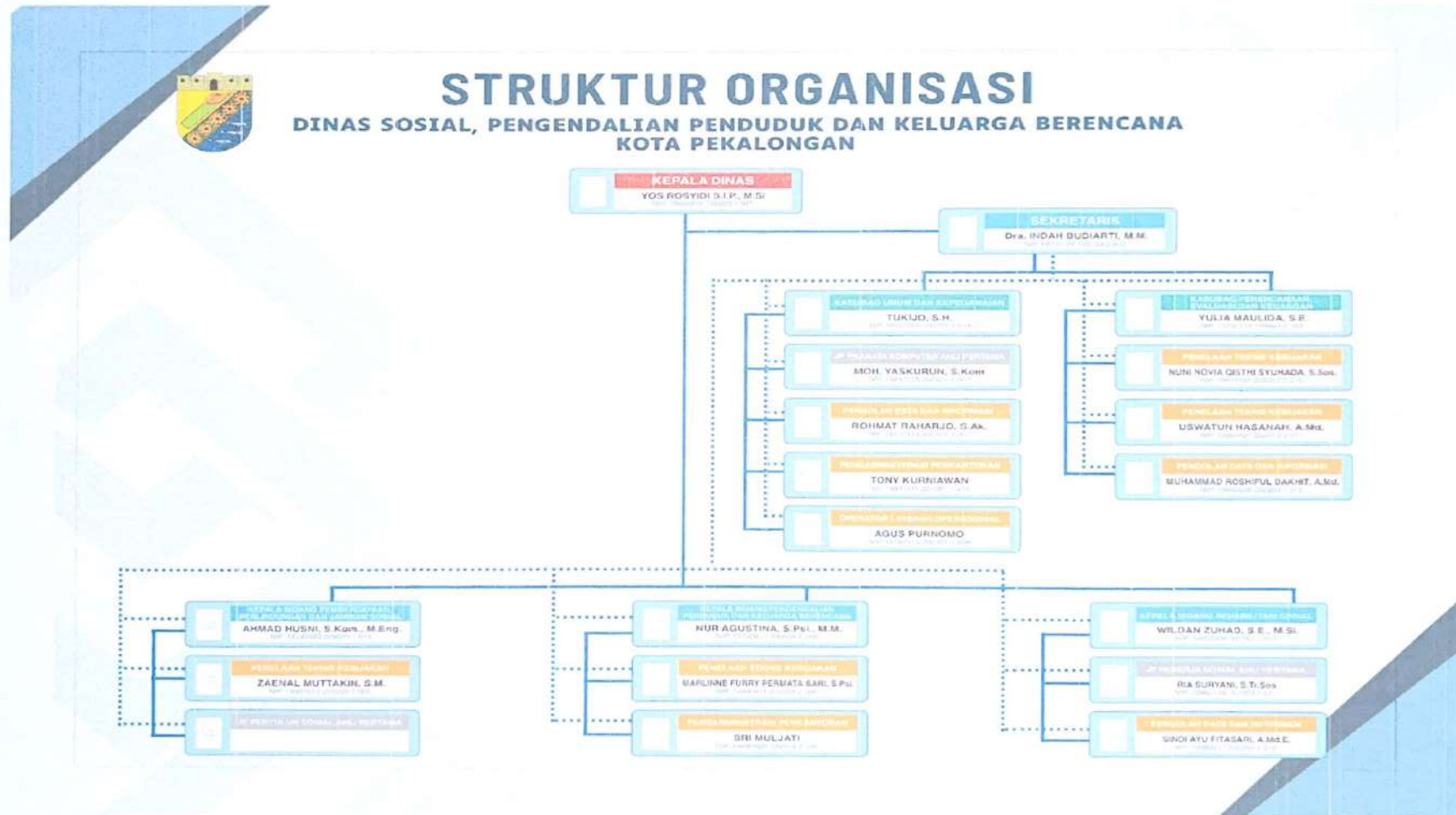
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengolah Data dan Informasi mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Membantu mengelola rencana program kerja, bahan dan alat pelengkapan bidang tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Membantu melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Membantu melaksanakan dan mengelola program kerja bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Membantu melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Membantu membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengolah Data dan Informasi, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengolah Data dan Informasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut

:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pengolah Data dan Informasi
Tahun 2025

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang
2	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang
3	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang
4	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang
5	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pengolah Data dan Informasi

Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang	65 Orang	135 Orang	207,69%

	Kewenangan Kabupaten/Kota					
3.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	0	0	-
4.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	0 Orang	480 Orang	96%
5.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	0 Orang	9 Orang	1,80%
Rata-rata						128,29%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi adalah sebesar 128,29% dengan kategori "sangat berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 128,29%, dengan kategori "sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P2KB Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



WILDAN ZUHAD, SE., M.Si
NIP. 19851026 201001 1 005



SINDI AYU FITASARI, A.Md, E
NIP. 19980617 202203 2 019

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

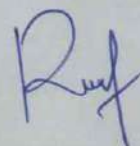
KATA PENGANTAR'

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pekerja Sosial Ahli Pertama Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pekerja Sosial Ahli Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA,



RIA SURYANI S.Tr.Sos

Penata Muda / III A

NIP. 19960129 202203 2 017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

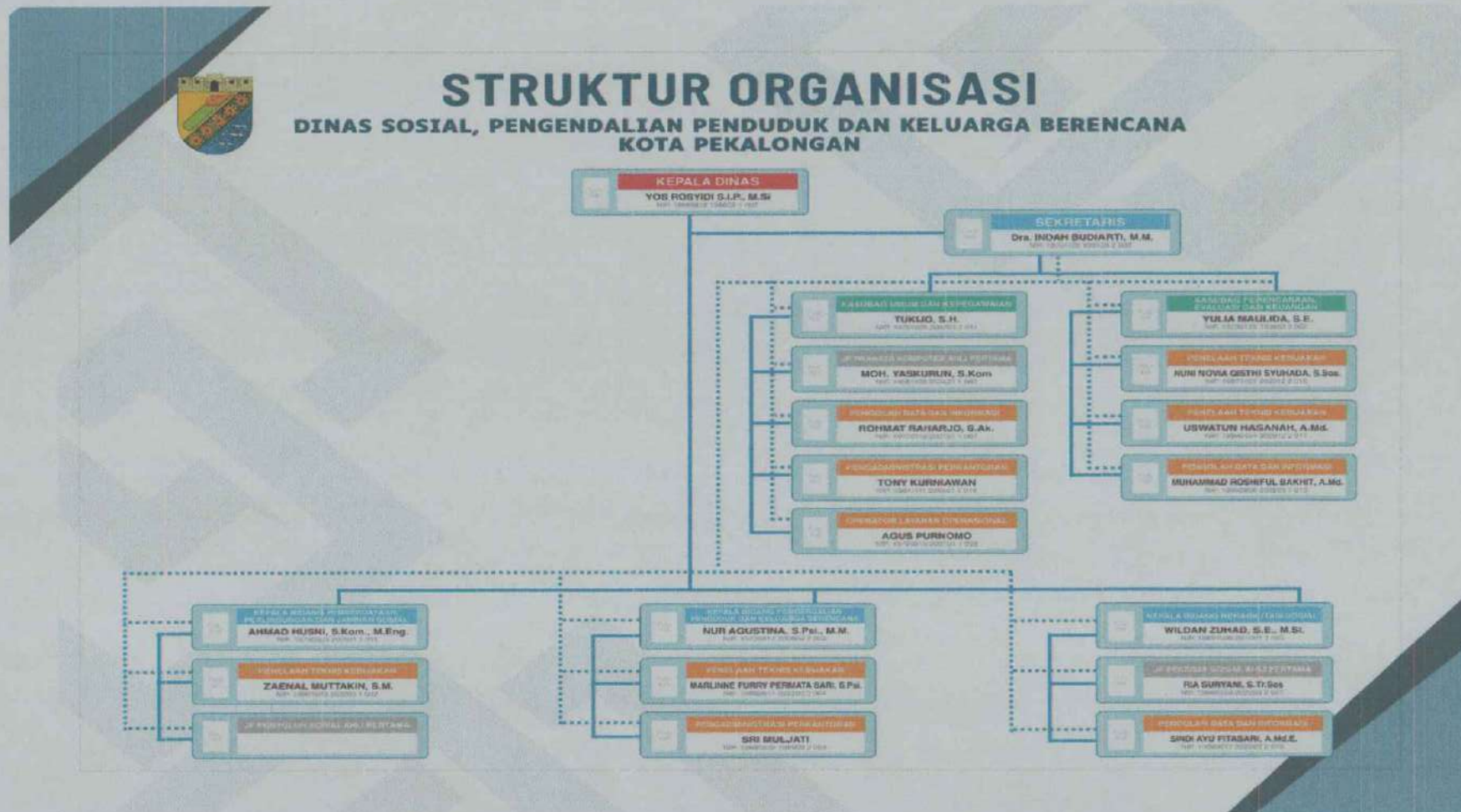
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pekerja Sosial Ahli Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Membantu menyusun materi dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Membantu menyusun dan melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Membantu menyusun dan melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Membantu menyusun dan menganalisa kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program;
5. Membantu melaksanakan kegiatan intervensi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Membantu melaksanakan kegiatan evaluasi hasil intervensi;
7. Membantu melaksanakan kegiatan terminasi;
8. Membantu melaksanakan kegiatan rujukan;
9. Membantu melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
10. Membantu melaksanakan kegiatan evaluasi program pelayanan.

C. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pekerja Sosial Ahli Pertama, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Tahun 2025

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang
2	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	903 Orang
3	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15 Orang
4	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang
5	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	83 Orang

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja "Pekerja Sosial Ahli Pertama"
Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	65 Orang	65 Orang	135 Orang	207,69%
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	903 Orang	0	0	-
3.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%
4.	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda	10 Orang	0	0	-

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
	bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS				
5.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	83 Orang	25 Orang	44 Orang	53,01%
6	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	500 Orang	500 Orang	480 Orang	96%
Rata-rata						114,17%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama adalah sebesar 114,17% dengan kategori “sangat berhasil”

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 114,17%, dengan kategori "sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial Ahli Pertama Sub Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P2KB Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

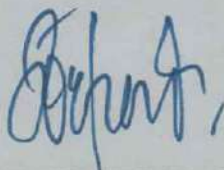
1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas

Pekalongan, 08 April 2025

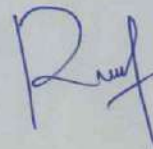
Mengetahui,

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,

PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA,



WILDAN ZUHAD, S.E., M.Si
NIP. 19851026 201001 1 005



RIA SURYANI, S.Tr, Sos
NIP. 19960129 202203 2 017

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



MARLINE FURRY PERMATA SARI, S.Psi

Penata Muda / III A
NIP. 19880611 202203 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	5
C Capaian Anggaran	8
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10
B Rekomendasi	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

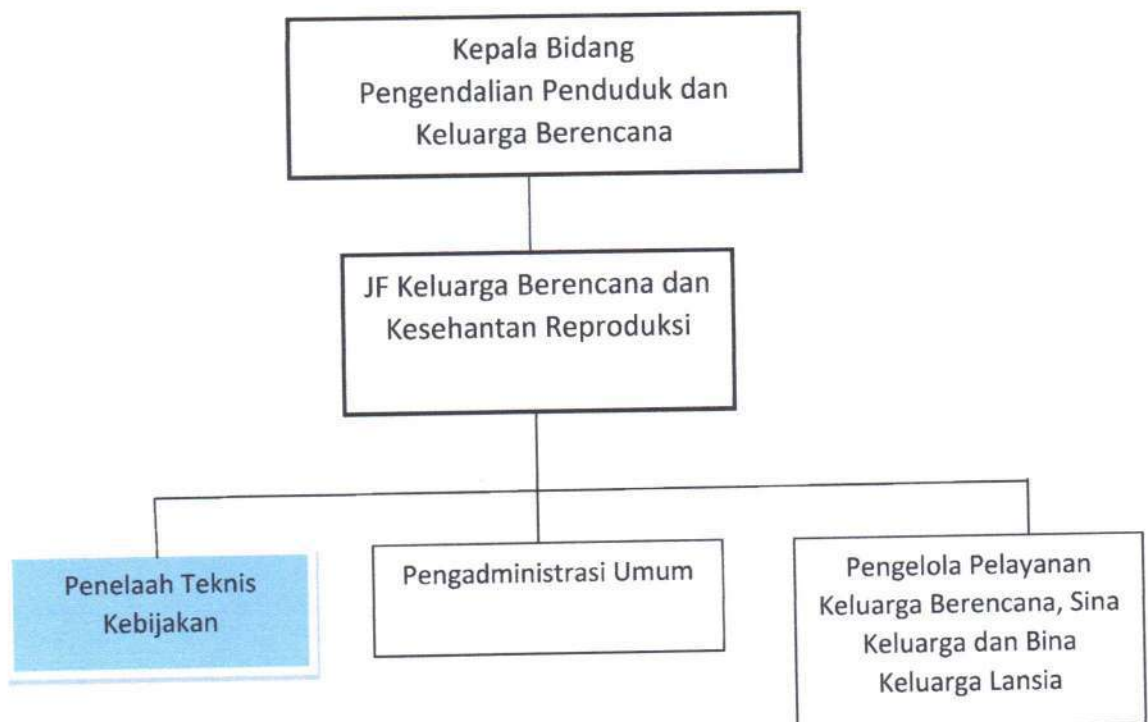
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerja;
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Presentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen
2	Tercapainya Angka kelahiran Remaja umur 15 – 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19)	Presentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,24 perseribu
3	Tercapainya kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Presentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,60 persen
4	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedia Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen
2	Tersedia Laporan Pencatatan dan	Jumlah Laporan Pencatatan dan	27

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengumpulan Data Keluarga	Pengumpulan Data Keluarga	Laporan
3	Tersedia Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan
4	Tersedia Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	40 Laporan
5	Tersusun dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen
6	Terlaksananya Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi
7	Tercapainya Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 Laporan
8	Tersedia Laporan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja “Penelaah Teknis Kebijakan”
Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1.	Tercapainya ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Presentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	-	-	-
2.	Tercapainya Angka kelahiran Remaja umur 15 – 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19)	Presentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,24 perseribu	-	-	-
3.	Tercapainya kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Presentase kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,60 persen	-	-	-
4.	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	-	-	-
5.	Tersedia Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	-	-	-

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
6.	Tersedia Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	-	-	-
7.	Tersedia Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	-	-	-
8.	Tersedia Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	40 Laporan	-	-	-
9.	Tersusun dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	-	-	-
10.	Terlaksananya Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan	3 Organisasi	-	-	-

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
	dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				
11.	Tercapainya Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 Laporan	-	-	-
12.	Tersedia Laporan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan	-	-	-
Rata-rata						-

Dari table di atas dapat dilihat bahwa target kinerja dan realisasi akan dilaksanakan pada Triwulan 2, 3 dan 4.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja dan realisasi akan dilaksanakan pada Triwulan 2, 3 dan 4.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam "Penelaah Teknis Kebijakan" Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja


Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,


NUR AGUSTINA, S.Psi, MM
NIP. 19720817 200604 2 003


MARLINNE FURRY PERMATA SARI, S.Psi
NIP. 19880611 2203 2 004

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN



DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN,



SRI MULJATI

Penata Muda TK I

NIP. 19680529 198903 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

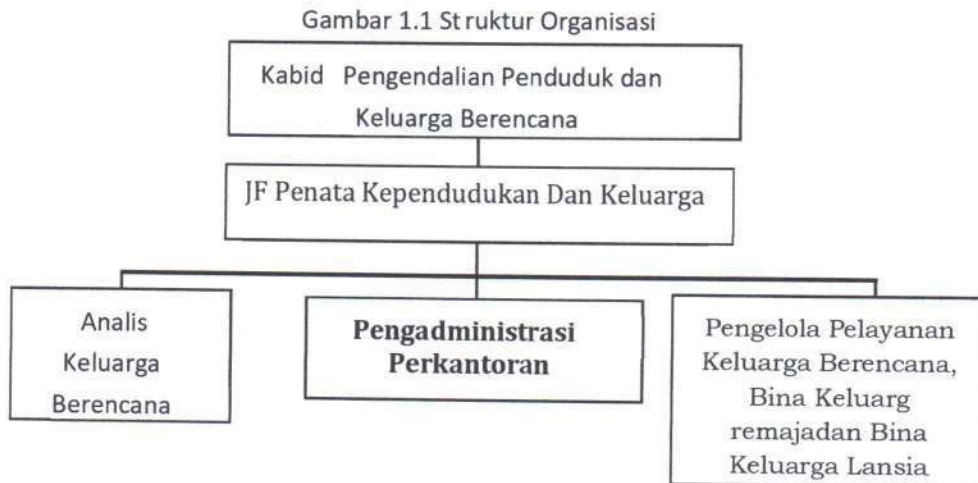
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Analisis Masalah Sosial mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima, mencatat dan menyortir surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.
2. Memberi lembar disposisi pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian.
3. Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian.
4. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadministrasian Perkantoran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasian Perkantoran
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya ketersediaan dokumen KKBPK ((Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 %
2	Tercapainya Angka kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19)	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19)	8,24 perseribu
3	Tercapainya kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Persentase kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,60 persen
4	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga	100 %

	Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
5	Tercapainya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 Dokumen
6	Tercapainya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan
7	Tercapainya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan
8	Tercapainya Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1137 orang
9	Tercapainya Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan

10	Tercapainya Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	5 Organisasi
----	---	--	--------------

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial P2KB Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Pengadministrasian Perkantoran Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial P2KB Triwulan I
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1	Tercapainya ketersediaan dokumen KKBPK ((Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 %	-	-	-
2	Tercapainya Angka kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19)	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19)	8,24 perseribu	-	-	-
3	Tercapainya kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data	Persentase kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran	20,60 persen	-	-	-

	keluarga Indonesia	basis data keluarga Indonesia				
4	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	-	-	-
5	Tercapainya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 Dokumen	-	-	-
6	Tercapainya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan	-	-	-

7	Tercapainya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	3	3	100 %
8	Tercapainya Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1137 orang	-	-	-
9	Tercapainya Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	-	-	-

10	Tercapainya Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	5 Organisasi	-	-	-
	Rata-rata Capaian					100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadministrasian Perkantoran adalah sebesar 100 % dengan kategori “tinggi”

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan
2. Penempatan target yang sesuai

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 %, dengan katerogi "berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial P2KB Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN,


NUR AGUSTINA, S.Psi. MM
NIP. 19720817 200604 2 003


SRI MULJATI
NIP. 19680529 198903 2 004

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN


TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,


NUNI NOVIA QISTHI SYUHADA, S.Sos
Penata Muda TK. I/ III B
NIP. 19971101 202012 2 015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

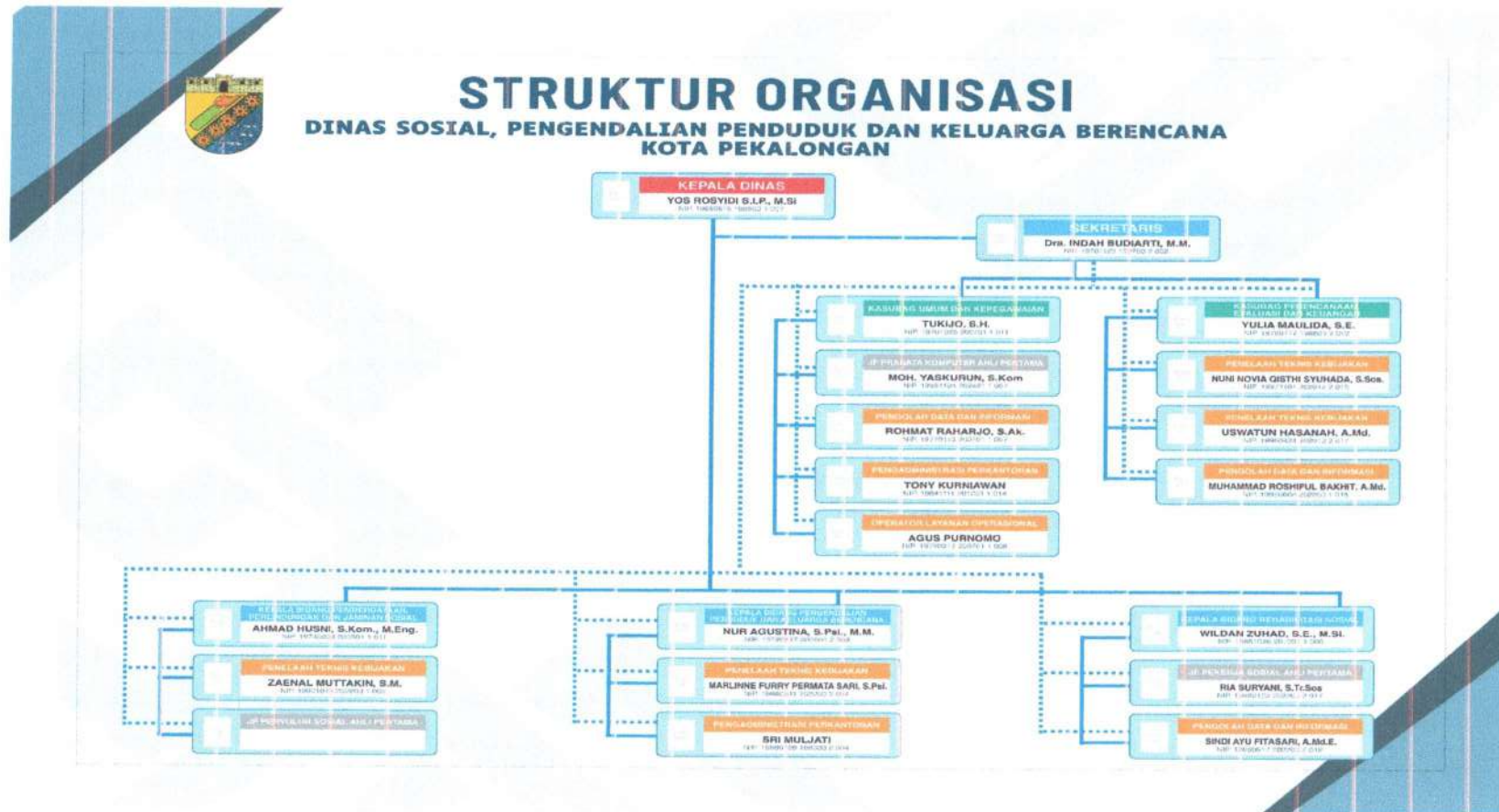
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menerima bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek kerja;
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja;
4. Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
5. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai;
6. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja;
7. Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II- AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1	Tercapainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen
2	Tercapainya Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	2 Dokumen
3	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15 Laporan
4	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen
5	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial P2KB Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1	Tercapainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-
2	Tercapainya Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-
3	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
4	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 100 % dengan kategori “sangat berhasil”

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan katerogi “sangat berhasil”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Dinas Sosial P2KB Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 8 April 2025

Mengetahui,

KEPALA SUB BAGIAN RENVAL DAN
KEUANGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN,

PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN,



YULIA MAULIDA, SE
NIP. 19790719 199803 2 002



NUNI NOVIA QISTHI SYUHADA, S.Sos
NIP. 19971101 202012 2 015

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,

USWATUN HASANAHAH, A.Md

Pengatur Tk.I-2D

NIP. 19960424 202012 2 017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

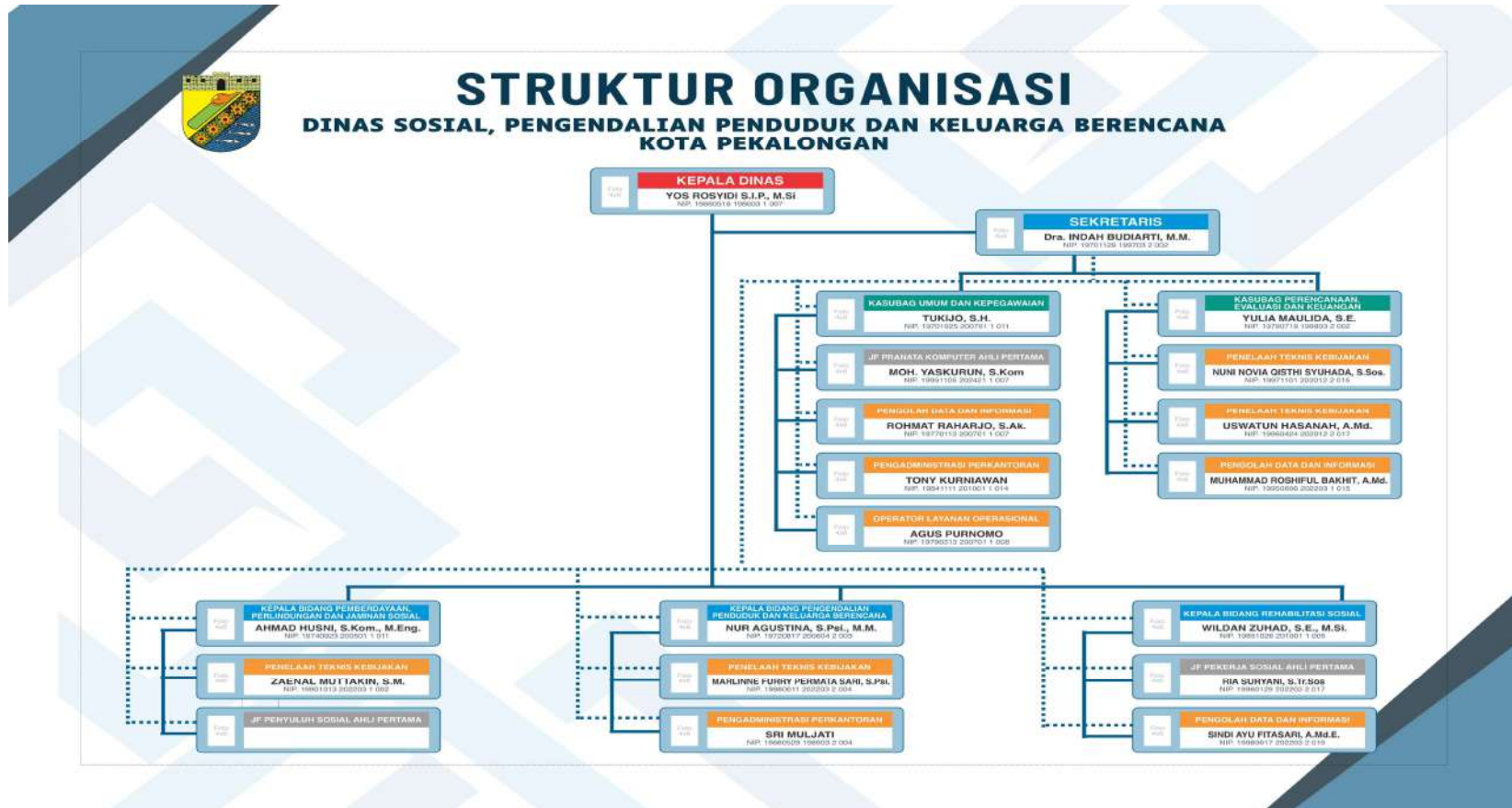
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menerima bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek kerja;
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja;
4. Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
5. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai;
6. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja;
7. Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II-

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20orang/bulan
2	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15 Laporan
3	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen
4	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial P2KB Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	20 orang/bulan	19 orang/bulan	95%
2	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
3	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keungan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100 %
4	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
	Rata-rata Capaian					98,75%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 98,75% dengan kategori “sangat berhasil”

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 98,75%, dengan katerogi "sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Dinas Sosial P2KB Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 8 April 2025

Mengetahui,

KEPALA SUB BAGIAN RENVAL DAN
KEUANGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



YULIA MAULIDA, SE
NIP. 19790719 199803 2 002



USWATUN HASANA H.A.Md
NIP. 19960424 202012 2 017

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PENGELOLA KEUANGAN



DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengelola Keuangan Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengelola Keuangan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengelola Keuangan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

Pengelola Keuangan



Muhammad Roshiful Bakhit, A.Md

Pengatur

NIP. 19950606 202203 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	4
A Perjanjian Kinerja	4
B Capaian Kinerja	5
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

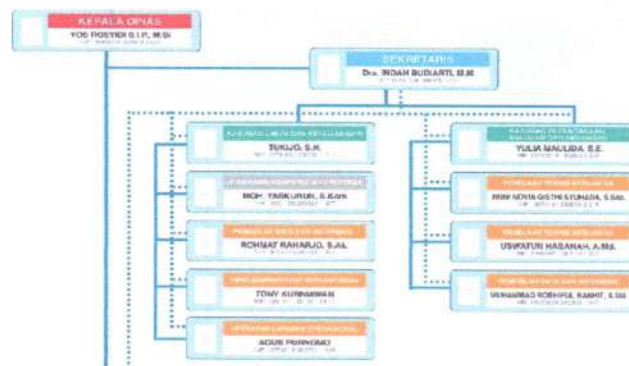
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengelola Keuangan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Mengelola rencana program kerja, bahan dan alat perlengkapan bidang tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya. Agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Melaksanakan dan mengelola program kerja bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengelola Keuangan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengelola Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengelola Keuangan
Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji & Tunjangan ASN	20 Orang
3	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
4	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
5	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengelola Keuangan Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengelola Keuangan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengelola Keuangan
Triwulan I Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	% Capaian
1	Tercapainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	% Capaian
2	Tersedianya Dokumen Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji & Tunjangan ASN	19 Orang	18 Orang	18 Orang	100 %
3	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
4	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
5	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Rata-rata Capaian						100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengelola Keuangan adalah sebesar 100 % dengan kategori “Sangat Tinggi / Sangat Berhasil”.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai;
2. Ketepatan dalam menentukan skala prioritas pekerjaan;
3. Koordinasi dan komunikasi yang baik sehingga pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengelola Keuangan adalah sebesar 100 % dengan kategori "Sangat Tinggi / Sangat Berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengelola Keuangan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan;
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja.

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui

Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan
Keuangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan,



Yulia Maulida, S.E

NIP. 19790719 199803 2 002

Pengelola Keuangan,



Muhammad Roshiful Bakhit, A.Md

NIP. 19950606 202203 1 015

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA



DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

Fungsional Pranata Komputer

Ahli Pertama



MOH. YASKURUN, S.Kom

NIP. 199511052024211007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

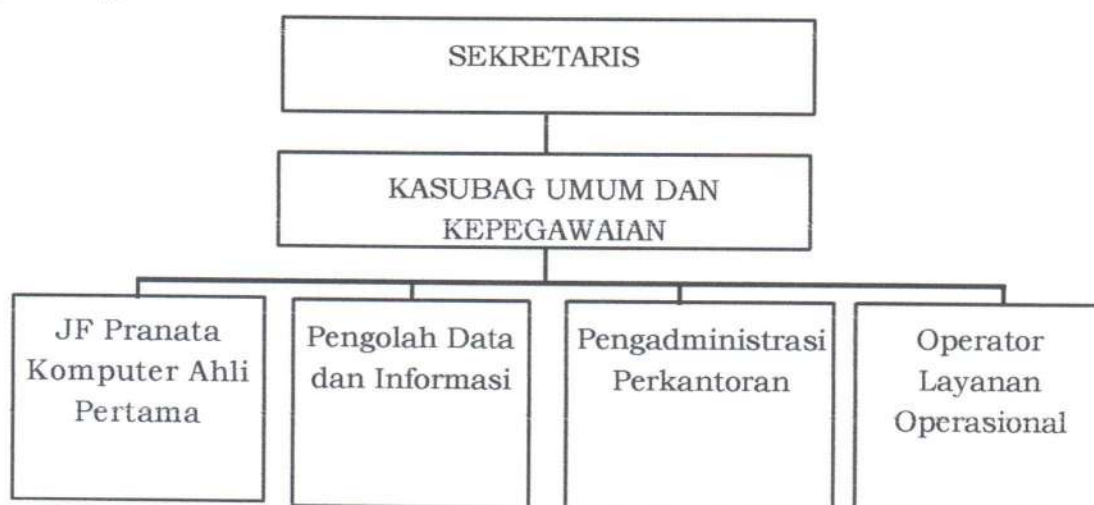
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Pranata Komputer mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Mengelola katalog layanan teknologi informasi;
2. Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi;
3. Menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data;
4. Melakukan implementasi data model;
5. Melakukan implementasi business intelligence;
6. Menyusun taksonomi data;
7. Menyusun arsitektur data;
8. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi;
9. Melakukan perancangan layanan akses data;
10. Melakukan implementasi rancangan layanan akses data;
11. Melakukan ingestion data;
12. Melakukan implementasi rancangan integrasi data;
13. Menyusun prosedur pengujian rancangan integrasi data;
14. Melakukan evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi;
15. Melakukan validasi kebutuhan informasi;
16. Menyusun dokumentasi rancangan database;
17. Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system;
18. Melakukan backup atau pemulihan data;
19. Menyusun tingkat kinerja database;
20. Melakukan peningkatan kinerja database;
21. Menyusun rencana retensi data;
22. Melakukan evaluasi teknologi data;
23. Melakukan pengadministrasian teknologi data;
24. Melakukan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data;
25. Mengelola pengguna dan hak akses data;
26. Menyusun pemetaan data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi;
27. Melakukan pengumpulan data audit teknologi informasi menggunakan metode tertentu;
28. Menerapkan rancangan fisik system jaringan computer kompleks;
29. Menerapkan rancangan logis system pengamanan jaringan computer kompleks;
30. Menyusun prosedur pemanfaatan system jaringan;
31. Melakukan uji coba system jaringan computer kompleks;
32. Melakukan evaluasi uji coba system jaringan computer sederhana;
33. Menyusun dokumentasi penggunaan system jaringan computer;
34. Melakukan optimalisasi system jaringan;
35. Melakukan deteksi dan /atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks;
36. Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara infrastruktur teknologi informasi dengan spesifikasi teknis;
37. Melakukan pengujian infrastruktur teknologi informasi;
38. Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;

39. Melakukan pemasangan infrastruktur teknologi informasi;
40. Melakukan pengaturan akses keamanan fisik teknologi informasi;
41. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur teknologi informasi;
42. Menyusun prosedur pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi;
43. Menyiapkan peralatan video conference (streaming), motioring peralatan berupa audio, video, dan perangkat jaringan, serta mengukur layout;
44. Melakukan optimalisasi kinerja infrastruktur teknologi informasi;
45. Melakukan perancangan system informasi;
46. Membuat program aplikasi system informasi;
47. Mengembangkan program aplikasi system informasi;
48. Melakukan penyiapan data untuk uji coba system informasi;
49. Melakukan uji coba system informasi;
50. Melakukan deteksi dan/atau perbaikan kerusakan system informasi;
51. Menyusun petunjuk operasional program aplikasi system informasi;
52. Menyusun dokumentasi pengembangan system informasi;
53. Melakukan instalasi, upgrade, dan konfigurasi system operasi dan/atau aplikasi;
54. Melakukan data crawling, data feeding, dan data loading;
55. Melakukan manipulasi data;
56. Menyusun definisi system proyeksi pada suatu data spasial;
57. Membuat peta tematik rinci;
58. Melakukan pengolahan data atribut dan spasial rinci;
59. Mengoperasikan tools untuk membuat storyboard;
60. Membuat flowchart untuk pemrograman multimedia;
61. Melakukan editing objek multimedia kompleks dengan piranti lunak;
62. Membuat objek multimedia kompleks dengan piranti lunak;
63. Membuat prototype kompleks pada program multimedia; dan
64. Membuat program multimedia kompleks.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama
Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system	4 Paket
2	Melakukan backup atau pemulihan data	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan backup atau pemulihan data	250 Backup
3	Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	12 Paket
4	Mengembangkan program aplikasi system informasi	Jumlah penyelesaian dalam Mengembangkan program aplikasi system informasi	1 Paket

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
5	Melakukan pengadministrasian teknologi data	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan pengadministrasian teknologi data	100 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama
Triwulan I Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	% Capaian
1	Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system	4 Paket	1 Paket	1	100%
2	Melakukan backup atau pemulihan data	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan backup atau pemulihan data	250 Backup	60	60	100%
3	Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	12 Paket	3	3	100%
4	Mengembangkan program aplikasi system informasi	Jumlah penyelesaian dalam Mengembangkan program aplikasi system informasi	1 Paket	0	0	-
5	Melakukan pengadministrasian teknologi data	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan pengadministrasian teknologi data	100 dokumen	25	25	100%
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini antara lain adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar tim serta dukungan dari pimpinan dan rekan kerja, pemahaman yang memadai terhadap tugas dan fungsi jabatan disertai kemampuan teknis di bidang teknologi informasi, perencanaan kerja yang terstruktur dan terukur, serta komitmen dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan kepada pimpinan atau instansi untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis di bidang teknologi informasi guna meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan teknologi terkini.
2. Meningkatkan kolaborasi lintas bidang kerja agar kegiatan yang melibatkan teknologi informasi dapat direncanakan dan dijalankan secara bersama-sama dan efisien.
3. Memberikan ruang dan waktu untuk berinovasi dan pengembangan ide terkait sistem informasi yang dapat menunjang pelayanan dan tata kelola internal instansi.
4. Mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja yang terbuka dan jelas, serta melakukan pembinaan atau pengarahan kepada pegawai yang kurang disiplin dan belum menunjukkan kompetensi kerja, agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara pegawai lain yang sudah bekerja dengan baik dan disiplin.

Mengetahui
Kepala Subbagian Umum
Dan Kepegawaian



TUKIJO. S.H.

NIP. 197010252007011011

Pekalongan, 08 April 2025

Fungsional Pranata Komputer
Ahli Pertama



MOH. YASKURUN. S.Kom

NIP. 199511052024211007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH



DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengelolaan barang milik Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa pengelolaan barang milik Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja pengelolaan dan pengadministrasian barang milik Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah



ROHMAT RAHARJO, S.Ak

NIP. 19770113 200701 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

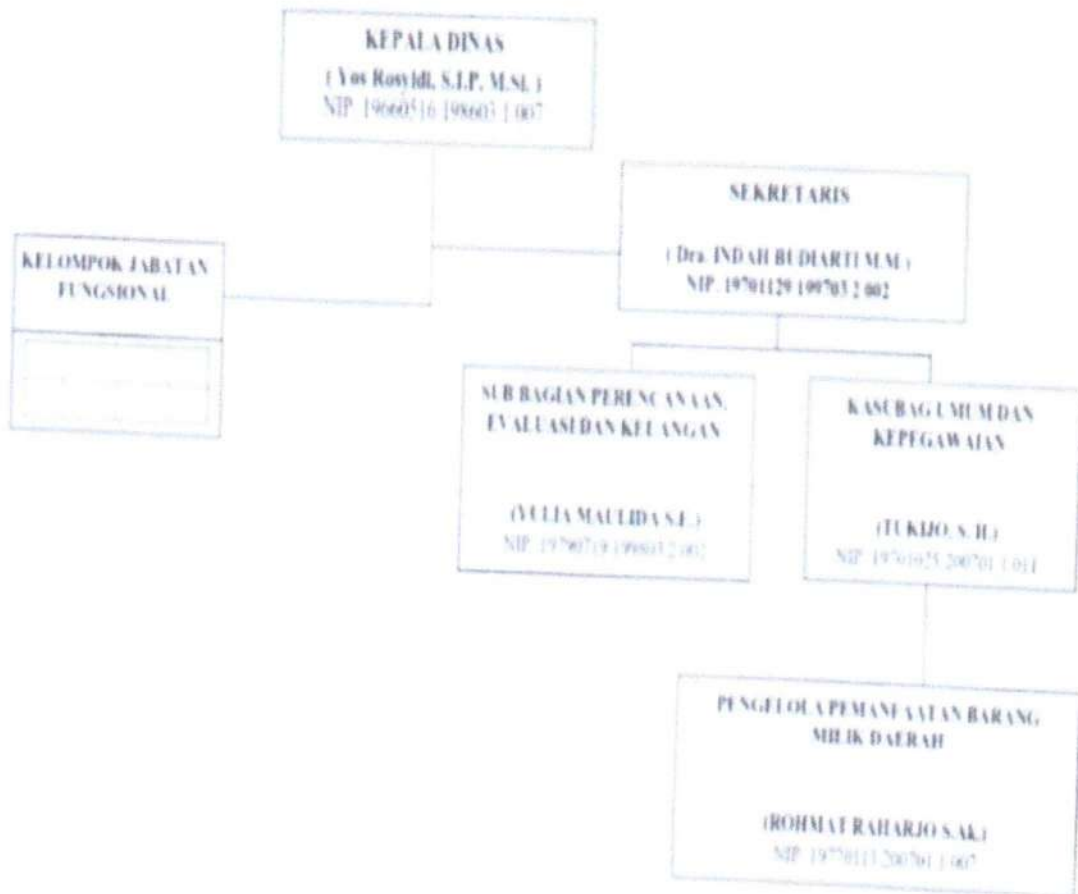
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Analisis Masalah Sosial mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya keikutsertaan dalam karnaval batik.
2. Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .
3. Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
4. Terlaksananya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
5. Tercapainya penyediaan peralatan rumah tangga
6. Tercapainya penyediaan makanan dan minuman
7. Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Terlaksananya penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
9. Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
10. Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
11. Tercapainya penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan
12. Tercapainya penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan Kantor
13. Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional
14. Terlaksananya gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
15. Terlaksananya gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Pengelola Pemanfaatan barang milik daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya keikutsertaan dalam karnaval batik	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	1 Kali
2	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
3	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan
4	Terlaksananya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 bulan
5	Tercapainya penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
6	Terlaksananya penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan

9	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 nulan
10	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
11	Tercapainya penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	12 bulan
12	Tecapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12 bulan
13	Terlaksananya gedung kantor yang terpeihara secara rutin/berkala	Jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengelola Barang Milik Daerah Sosial Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2025 Triwulan I
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya keikutsertaan dalam karnaval batik	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	1 Kali
2	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
3	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan
4	Terlaksananya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 bulan
5	Tercapainya penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
6	Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercapainya penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan barang Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan
7	Terlaksananya penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
9	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan
10	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
11	Tercapainya penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	12 bulan

12	Tecapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12 bulan
13	Terlaksananya gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 100 % dengan kategori "Sangat berhasil/ sangat tinggi

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan katerogi "sangat tinggi/ sangat berhasil;

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pengelola Pemanfaatan barang milik daerah Dinas Sosial P2KB Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

B. Rekomendasi,

1. Lebih tertib lagi dalam pengelolaan dan pengadministrasian barang milik Daerah (BMD)
2. Selalu update barang setiap ada mutasi
3. KIR setiap 6 bulan sekali harus di ganti
4. Pengelolaan pengadministrasian barang persediaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN ,



TUKIJO. SH

NIP. 19701025 200701 1 011

PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH,



ROHMAT RAHARJO. S.Ak

NIP. 19770113 200701 1 007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PRAMU KEBERSIHAN



DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pramuka Kebersihan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pramuka Kebersihan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pramuka Kebersihan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025

Pramuka Kebersihan,



AGUS R. NOMO

NIP. 19790313 200701 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

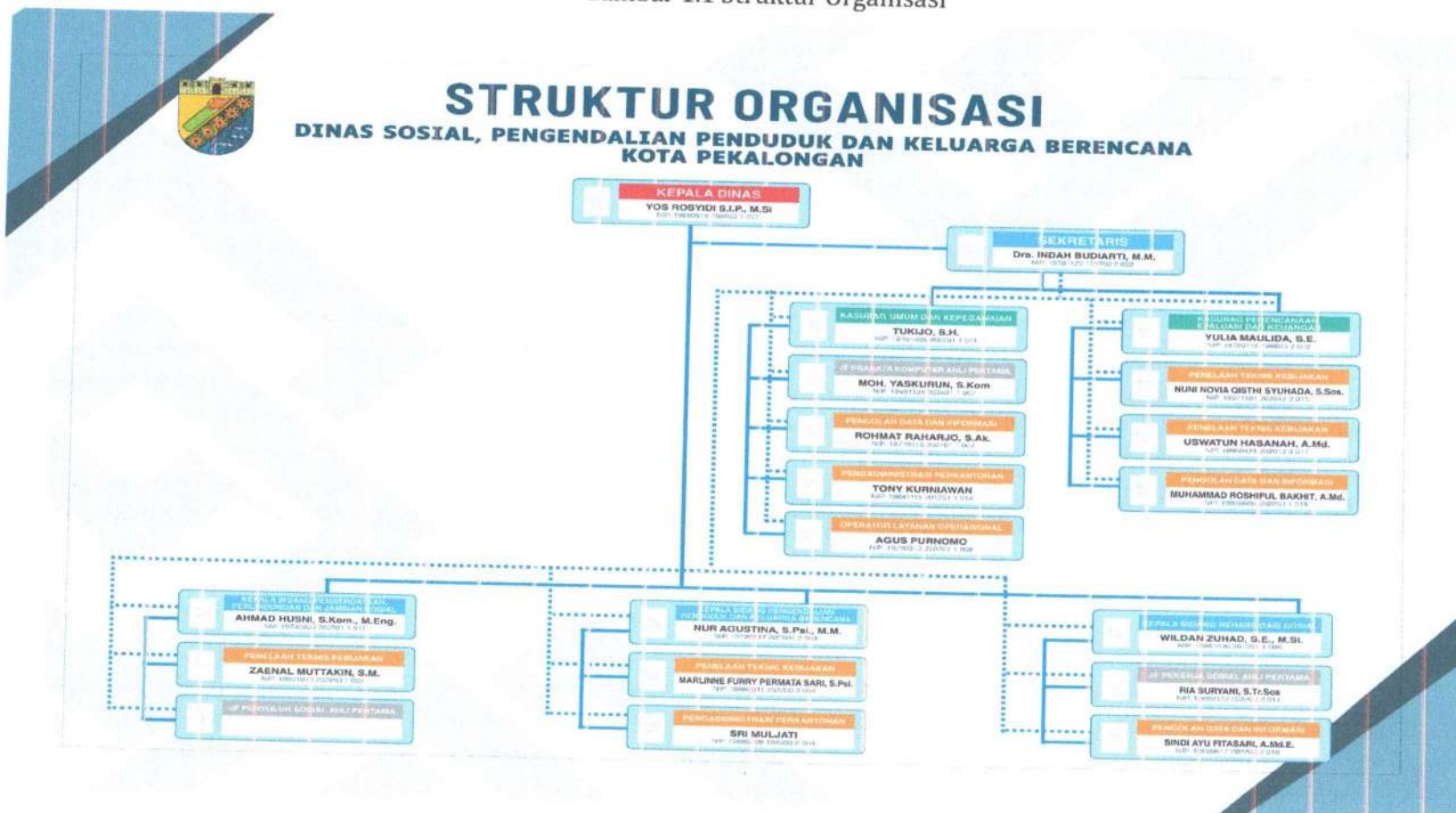
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pramu Kebersihan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
2. Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
3. Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali.
4. Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak.
5. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pramu Kebersihan Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II-

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Pramu Kebersihan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pramu Kebersihan Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan
2	Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan kebutuhan pelaksanaan kegiatan	250 Kegiatan
3	Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	Jumlah kegiatan kebersihan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan
4	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan perawatan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan
5	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai Akuntabilitas pelaksanaan tugas	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pramu Kebersihan Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Capaian Anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Pramu Kebersihan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pramu Kebersihan Dinas Sosial P2KB Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan	61 Kegiatan	61 Kegiatan	100 %
2	Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan kebutuhan pelaksanaan kegiatan	250 Kegiatan	61 Kegiatan	61 Kegiatan	100 %
3	Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	Jumlah kegiatan kebersihan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan	61 Kegiatan	55 Kegiatan	90 %
4	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan perawatan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan	61 Kegiatan	61 Kegiatan	100 %
5	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	33.33 %

	prosedur sebagai Akuntabilitas pelaksanaan tugas					
	<i>Rata-rata Capaian</i>					84,66 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pramu Kebersihan adalah sebesar 84,66 % dengan kategori “berhasil”

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 84,66 %, dengan katerogi “berhasil”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pramu Kebersihan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Dinas Sosial P2KB Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 8 April 2025

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian,

Pramu Kebersihan,



Tukijo, SH

NIP. 19701025 2007 01 011



Agus Purnomo

NIP. 19790313 200701 1 008

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DINSOS P2KB
KOTA PEKALONGAN



DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Operator Layanan Operasional Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Operator Layanan Operasional mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Operator Layanan Operasional melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



TONY KURNIAWAN

PENGATUR Tk.I

NIP. 19841111 201001 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Jabatan	5
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	6
A Perjanjian Kinerja	6
B Capaian Kinerja	6
BAB III PENUTUP	9
A Kesimpulan	9
B Rekomendasi	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025	6
Tabel 2.2	Pengukuran dengan Skala Ordinal	7
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	5
------------	---------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

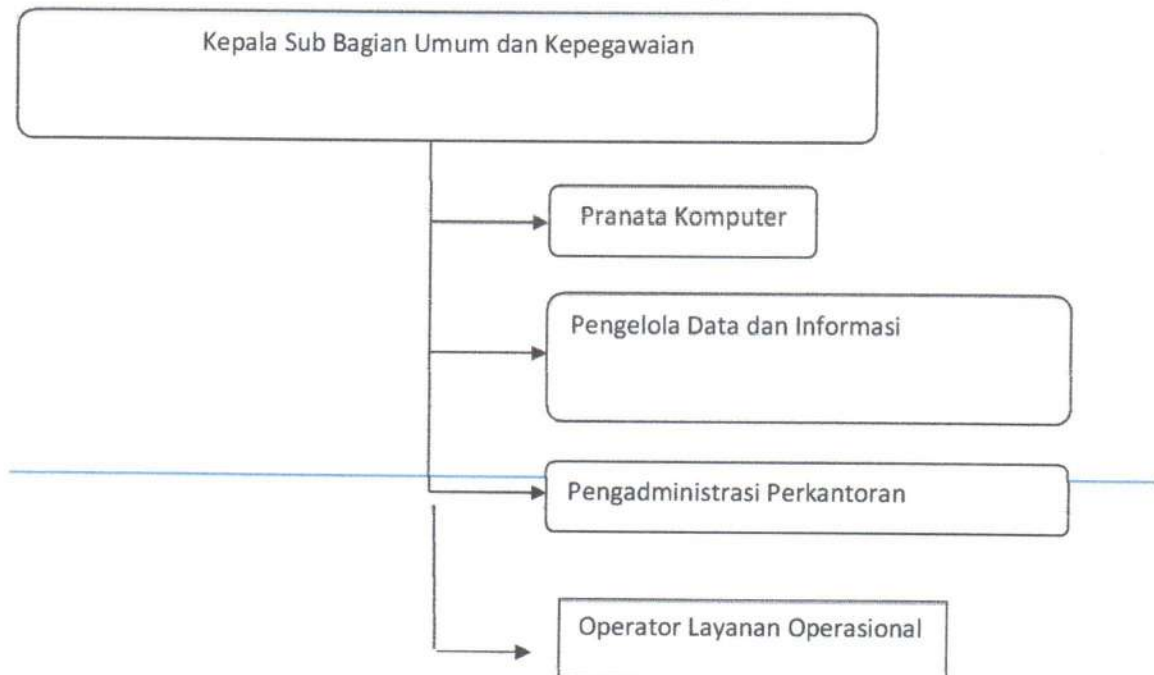
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Operator Layanan Operasional pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Membersihkan ruangan, halaman, saluran , kamar mandi dan lingkungan Kantor.
2. Melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman perindang dan tanaman hias.
3. Melakukan perawatan peralatan kebersihan.
4. Menyiapkan dan menyusun data /laporan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Operator Layanan Operasional, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Operator Layanan Operasional
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Membersihkan ruangan, halaman, saluran , kamar mandi dan lingkungan Kantor	Tercapainya kebersihan ruangan, halaman, saluran , kamar mandi dan lingkungan Kantor	100%
2	Melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman perindang dan tanaman hias	Terawatnya dan terpeliharanya tanaman perindang dan tanaman hias	100%
3	Melakukan perawatan peralatan kebersihan	Terawatnya peralatan kebersihan	100%
4	Menyiapkan dan menyusun data /laporan	Tersedia dan tersusunnya data /laporan	100%
5	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Terlaksananya tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	100%

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Operator Layanan Operasional pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Operator Layanan Operasional
Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1	Membersihkan ruangan, halaman, saluran , kamar mandi dan lingkungan Kantor;	Tercapainya kebersihan ruangan, halaman, saluran , kamar mandi dan lingkungan Kantor	100%	25%	25%	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
2	Melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman perindang dan tanaman hias;	Terawatnya dan terpeliharanya tanaman perindang dan tanaman hias	100%	25%	25%	100%
3	Melakukan perawatan peralatan kebersihan;	Terawatnya peralatan kebersihan	100%	25%	25%	100%
4	Menyiapkan dan menyusun data /laporan;	Tersedia dan tersusunnya data /laporan	100%	25%	25%	100%
5	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Terlaksananya tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	100%	25%	25%	100%
Rata-rata Capaian						100%

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Operator Layanan Operasional adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Operator Layanan Operasional Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan tercapai.
2. Penetapan indicator kinerja individu yang mengacu pada indicator kinerja organisasi

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Operator Layanan Operasional



TUKLI S.H

NIP. 19701025 200701 1 011



TONY KURNIAWAN

NIP. 19841111 201001 1 014